

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Pemerintah dan negara wajib menjamin dan memberikan perlindungan kepada anak. Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 20 bahwa Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Dalam pasal 1 dijelaskan arti perlindungan anak yaitu, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam Konvensi Hak-hak Anak pasal 12 menyatakan bahwa negara-negara peserta akan menjamin hak anak untuk menyatakan pandangannya secara bebas menyangkut hal-hal yang berpengaruh bagi kehidupannya sesuai dengan bobot yang telah disesuaikan dengan usia dan kematangan anak (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, 1989). Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak dapat menyatakan pendapatnya secara bebas sesuai dengan kemampuannya. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan Pasal 1 ayat 2, yang menjelaskan bahwa “Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan dirinya dan dilaksanakan atas kesadaran, pemahaman serta kemauan bersama sehingga anak dapat menikmati hasil atau mendapatkan manfaat dari keputusan tersebut” (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2011)

Dalam Konvensi Hak-hak anak pasal 29, pendidikan dimaksudkan untuk mendukung perkembangan kepribadian, bakat dan kemampuan, serta

tanggung jawab yang berguna bagi kehidupan bermasyarakat (Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa, 1989). Menurut Percy-Smith dan Thomas (Lansdown, Jimerson, & Shahroozi, 2014). maksud dari tujuan tersebut adalah menghargai anak sebagai peran yang aktif dalam pendidikan.

Namun, Kementrian PPPA (Sicca, 2018) mencatat di Indonesia ada 220.000 laporan mengenai pelanggaran hak anak pada tahun 2017, termasuk didalamnya adalah pelanggaran hak partisipasi anak. Dermawan (Sicca, 2018) mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak hanya dilibatkan secara fisik namun suaranya masih sering diabaikan. Berdasarkan survey yang dilakukan oleh Komisi Perlindungan Anak (Thoomaszen, 2017), menunjukan rendahnya angka partisipasi anak di Indonesia. Dari seluruh partisipan, sebagian besar masih menganggap anak sebagai objek manipulasi (58%), dekorasi (14%), dan simbolis (10%).

Penelitian yang membahas tentang hak anak khususnya hak partisipasi sudah banyak dilakukan. Seperti artikel tentang hak partisipasi anak dalam penelitian yang dilakukan oleh Powell dan Smith (2009). Fokus utama dari artikel ini adalah melihat bagaimana hak partisipasi anak dijunjung tinggi dalam penelitian-penelitian yang melibatkan anak di Selandia Baru. Dalam artikel lain, Simpson (1997) membahas pelibatan anak dalam perencanaan dan desain kota. Menurut Simpson (1997), penting bagi kita untuk mengerti definisi anak yang sebenarnya, apakah anak diartikan sebagai penduduk kota 'masa depan' yang saat ini belum sanggup berpartisipasi dalam hal-hal yang berpengaruh bagi hidup mereka (seperti perencanaan dan desain kota) atau apakah mereka sudah bisa dianggap sebagai penduduk kota yang sebenarnya dan sanggup berpartisipasi dalam urusan kemasyarakatan. Sedangkan, Landsdown dkk (2014), membahas pasal-pasal dalam konvensi hak-hak anak terkait pemenuhan hak partisipasi anak di sekolah. Penelitian lain dilakukan oleh Berthelsen dan Brownlee (2005), dimana mereka melakukan penelitian yang melibatkan 21 partisipan wanita berusia 21 sampai 45 tahun. Para partisipan adalah orang-orang yang sedang mengenyam pendidikan ataupun sudah lulus di bidang perawatan anak ataupun pendidikan anak usia dini. Penelitian ini dilakukan untuk

mengetahui hak partisipasi anak dalam *child care program*. Adapun penelitian yang dilakukan di Indonesia, yaitu pengamatan terhadap hubungan interaksi orang tua dan anak dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Rini (2014).

Sejauh ini, berdasarkan hasil pencarian peneliti terhadap google scholar dan mendeley tentang pemenuhan hak partisipasi anak di satuan PAUD masih sangat jarang. Penelitian-penelitian tersebut memang membahas tentang hak partisipasi anak, namun tidak ada yang membahas hak partisipasi anak di ranah pendidikan anak usia dini secara khusus. Maka, pemenuhan hak partisipasi anak di Taman Kanak-kanak merupakan hal yang menarik untuk diteliti. Karena hak partisipasi merupakan salah satu hak dasar yang harus dimiliki setiap manusia tidak terkecuali anak usia dini, dan sekolah merupakan tempat kedua selain rumah dimana anak menghabiskan sebagian besar waktunya. Peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi pemenuhan hak partisipasi anak usia dini di taman kanak-kanak. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul penelitian “Pemenuhan Hak Partisipasi dalam Proses Pembelajaran di Taman Kanak-kanak.”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini dituangkan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Seperti apakah pandangan guru mengenai hak partisipasi anak?
2. Bagaimanakah pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembelajaran di taman kanak-kanak?
3. Bagaimanakah bentuk kerjasama yang dilakukan sekolah dalam upaya pemenuhan hak partisipasi anak?
4. Hambatan apa yang dirasakan guru dalam pemenuhan hak partisipasi anak di taman kanak-kanak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan guru mengenai hak partisipasi anak.
2. Untuk mengetahui pemenuhan hak partisipasi anak dalam pembelajaran di taman kanak-kanak.
3. Untuk mengetahui bentuk kerjasama yang dilakukan sekolah dalam upaya pemenuhan hak partisipasi anak.
4. Untuk mengetahui hambatan yang dirasakan guru dalam pemenuhan hak partisipasi anak di taman kanak-kanak.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak. Adapun manfaat yang dapat diberikan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan anak usia dini untuk memperoleh kajian keilmuan mengenai hak partisipasi anak di taman kanak-kanak.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menambah wawasan peneliti tentang pemenuhan hak partisipasi anak di taman kanak-kanak.